

**KAJIAN TENTANG PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Baiq Kisnawati¹⁾, Irianto²⁾

^{1,2)}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram

Email : baiqkisnawati@gmail.com

Abstract,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran pemerintah di sector pendidikan dan sector kesehatan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini terdiri dari tiga variable mandiri yaitu Pengeluaran Pemerintah di sector pendidikan, pengeluaran pemerintah di sector kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa data historis selama enam tahun dari tahun 2010 sampai dengan 2015. Tehnik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memberikan gambaran bagaimana perkembangan pengeluaran pemerintah di sector pendidikan, sector kesehatan dan gambaran peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya akan dianalisis bagaimana peningkatan IPM tersebut jika terjadi penambahan pengeluaran pemerintah di sector pendidikan maupun di sector kesehatan dari tahun ke tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran pemerintah pertahun pada sector pendidikan dan sector Kesehatan selama periode penelitian sebesar Rp 798.677.174.616 (Rp 659.306.886.038 pengeluaran di sector pendidikan dan 139.370.288.578 pengeluaran di sector kesehatan) atau rata-rata pengeluaran pemerintah sebesar 18,21% pertahun dengan komposisi 15,11 % untuk sector pendidikan dan 3,10% untuk sector kesehatan. Dalam kurun waktu tersebut terjadi kenaikan IPM dari 58,86 pada tahun 2010 menjadi 62,83 pada tahun 2015 atau terdapat kenaikan sebesar 3,97 poin. Jadi dengan pengeluaran pemerintah sebesar tersebut ternyata mampu meningkatkan IPM rata-rata setiap tahunnya adalah 0,794 poin. Dari data tersebut dapat pula digambarkan bahwa setiap ada tambahan pengeluaran biaya pendidikan sebesar 15,11% dan biaya kesehatan sebesar 3,10% maka dapat menaikkan IPM sebesar 0,794 poin. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rata-rata IPM di Kabupaten Lombok Timur sebesar "60.96", ini berarti capaian pembangunan manusianya tergolong kelompok "sedang". Untuk mempercepat capaian pembangunan manusia dari kelompok "sedang" : $60 \leq IPM < 70$ ke tingkat kelompok "tinggi" yakni: $70 \leq IPM < 80$ maka dibutuhkan tambahan alokasi anggaran untuk sector pendidikan dan sector kesehatan dalam tahun-tahun berikutnya. Dari kondisi ini disarankan agar pemerintah untuk tahun-tahun yang akan datang secara bertahap meningkatkan pengeluarannya di sector pendidikan dan kesehatan agar IPM di kabupaten Lombok Timur dapat segera mewujudkan IPM ke tingkat kelompok "Tinggi".

Keywords : *sector pendidikan, sector kesehatan, IPM*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan pada awalnya hanya diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai wujud tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi pada suatu negara, namun kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi khususnya pada Negara yang sedang berkembang. Menurut Todaro (2006 : 28) tujuan utama dari pembangunan adalah : 1) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan. 2) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan. 3) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan

membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara-bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Pembangunan manusia menurut United Nation Development Programme (UNDP) adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (“a process of enlarging people’s choices”). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimate end) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (principal means) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, menurut UNDP (1995), paradigma pembangunan manusia terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu : (1) Produktifitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia, (2) Ekuitas, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini, (3) Kestinambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi, (4) Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan produktifitas manusia akan meningkat sehingga mereka menjadi agen pertumbuhan yang efektif.

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitik beratkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan saja dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya karena pembangunan suatu negara tidak bisa dikatakan berhasil apabila hanya melihat dari besarnya pendapatan domestik bruto saja tanpa meningkatkan pembangunan manusianya. Modal manusia (human capital) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi karena pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kualitas human capitalnya. Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Kualitas modal manusia ini misalnya dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun indikator-indikator lainnya. Sering kali tingginya pendapatan domestik bruto suatu negara tidak diimbangi dengan tingkat pembangunan manusia, hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat yang diakibatkan oleh kesenjangan tingkat ekonomi masing-masing kelompok masyarakat.

Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan, karena Kesehatan serta pendidikan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan manusia merupakan hal yang mutlak dilakukan guna mencetak sumberdaya manusia yang memadai untuk melaksanakan pembangunan. Dengan sumber daya manusia yang baik dan memadai maka pelaksanaan pembangunan akan semakin lancar dalam berbagai sektor. Dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas SDM. Pemerintah hendaknya memperhatikan hal tersebut terlebih jika memandang manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, sehingga pembangunan manusia yang kemudian menunjang pembangunan di berbagai sektor akan mewujudkan kesejahteraan bagi manusia yang berada dalam wilayah pemerintahan tersebut. Pembangunan manusia merupakan hal yang penting

terutama bagi sebagian negara khususnya negara yang sedang berkembang hal ini disebabkan oleh karena banyak negara dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi namun gagal dalam menghadapi masalah kesenjangan sosial dan meningkatnya kemiskinan, selain itu pembangunan manusia sebenarnya merupakan investasi tidak langsung terhadap pencapaian tujuan perekonomian nasional.

Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah, maka tentunya diperlukan pula dana yang besar. Pengeluaran pemerintah ini merupakan konsekuensi dari berbagai kebijakan yang diambil dan diterapkan. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Diharapkan Investasi pada sektor ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM dan mengurangi kemiskinan.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif. Investasi pada modal manusia diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian yang salah satunya dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan, kesehatan dan tingkat kemiskinan. Investasi modal manusia ini yang mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia membutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dalam mendorong peningkatan kualitas SDM. Gambaran yang dapat diambil guna melihat seberapa jauh peran pemerintah untuk menjadi fasilitator dari Pembangunan Manusia adalah melalui kebijaksanaan pengeluaran pemerintah yang diambil. Salah satu hal yang paling menentukan dalam suksesnya Pembangunan Manusia adalah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga dua sektor tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah guna mewujudkan Pembangunan Manusia yang pada akhirnya menjadi input dalam proses pembangunan di berbagai sektor.

Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan menurut UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. Sedangkan Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem pendidikan Nasional disebutkan bahwa pengalokasian dana pendidikan dalam pasal 49 disebutkan bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sector pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pembangunan manusia di Propinsi NTB secara umum, terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2015. Ini ditandai dengan meningkatnya IPM dari tahun ke tahun seperti digambarkan pada table berikut :

Table 1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB Tahun 2010-2015

NO.	URAIAN	TAHUN						Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Ipm Kota Mataram	72,47	73,50	74,22	75,22	75,93	76,37	74,62
2	Ipm Kota Bima	70,11	70,57	71,21	71,72	72,23	72,99	71,47
3	Ipm Sumbawa Barat	65,42	65,94	66,45	66,86	67,19	68,38	66,71
4	Ipm Dompu	61,44	61,84	62,60	63,16	63,53	64,56	62,86
5	Ipm Lombok Barat	60,61	61,64	62,24	62,91	63,52	64,62	62,59
6	Ipm Sumbawa	60,93	61,50	61,96	62,44	62,88	63,91	62,27

7	lpm Bima	60,19	60,62	61,05	62,08	62,61	63,48	61,67
8	lpm Lombok timur	58,86	59,84	60,73	61,43	62,07	62,83	60,96
9	lpm Lombok Tengah	58,97	59,77	60,57	61,25	61,88	62,74	60,86
10	lpm Lombok Utara	56,13	57,13	58,19	59,20	60,17	61,15	58,66
11	IPM NTB	61,16	62,14	62,98	63,76	64,31	65,19	63,26

Sumber: BPS NTB Tahun 2016,

Tabel di atas menggambarkan bahwa IPM NTB meningkat dari 61,16 pada tahun 2010 menjadi 65,19 pada tahun 2015 dan masih berstatus IPM “sedang”, Walaupun demikian, selama periode tersebut IPM NTB menunjukkan kemajuan yang besar, IPM Propinsi NTB rata-rata tumbuh sebesar 1,28 persen per tahun, Pada periode 2014-2015 tumbuh 1,36 persen, Pertumbuhan pada periode tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2013-2014, hanya tumbuh sebesar 0,88 persen, Walaupun IPM Propinsi masih dibawah IPM Nasional, namun jarak IPM Nasional dengan IPM NTB dari tahun ke tahun semakin kecil/mendekat, jika pada tahun 2010 jarak IPM NTB dengan Nasional 5,37 poin maka pada tahun 2015 menjadi 4,36 poin, Dari sepuluh kabupaten dan kota yang ada di Propinsi NTB, secara rata-rata Kota Mataram memiliki IPM tertinggi yaitu 74,62 diikuti Kota Bima 71,47, Sedangkan yang memiliki IPM terendah adalah Kabupaten Lombok utara dengan IPM 61,15 diikuti Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur dengan rata-rata IPM masing-masing 62,74 dan 62, 84, IPM Kabupaten Lombok Timur masih dibawah IPM NTB sejak tahun 2010 sampai dengan 2015, Melihat data IPM Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2010 sampai dengan 2011 masih tergolong kelompok “rendah” karena IPM dibawah “60”, sedangkan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sudah meningkat menjadi kelompok “sedang” dengan kisaran IPM yang dicapai yaitu 60,73 sampai dengan 62,83,

Dalam penelitian Septiana dkk (2015) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, Dan variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif, terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara, Usmalıadanti (2011) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembangunan Manusia, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pembangunan Manusia, Astri (2013) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Sedangkan secara parsial variabel pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan berpengaruh pada IPM, namun pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh pada IPM, Arifin (2015) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sector kesehatan dan pengeluaran pemerintah sector pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia,

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk untuk meneliti seberapa besar pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten Lombok Timur,

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini tergolong penelitian deskriptif yaitu penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu klas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 1999:63), Variabel dalam penelitian ini menunjukkan variable mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain, Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pengeluaran pemerintah di sector pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif dalam bentuk data ratio yakni data mengenai pengeluaran pemerintah di sector pendidikan, sector kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sumber data tersebut tergolong data skunder dimana data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik

(BPS) Kabupaten Lombok Timur dan BPS Propinsi NTB, Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dokumentasi, Menurut Sugiyono (2013:240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, Data yang dikumpulkan dalam hal ini adalah laporan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran sektor kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lombok Timur, Sehubungan jenis penelitaian ini tergolong penelitian deskriptif maka teknik analisis data dianalisis secara kualitatif dengan memeberikan gambaran bagaimana perkembangan pengeluaran pemerintah di sector pendidikan , sector kesehatan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Selanjutnya akan dianalisis bagaimana peningktan IPM tesebut jika terjadi penambahan pengeluaran pemerintah di sector pendidikan maupun di sektor kesehatan dari tahun ke tahun,

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengeluaran Pemerintah di sektor Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pengalokasian dana pendidikan dalam pasal 49 disebutkan bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sector pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Adapun pengeluaran pemerintah Kabupaten Lombok Timur di sector pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2, Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Di Kabupaten Lombok Timur (Rp)

No	Tahun	Pendidikan	Perkembangan	Persentase
1	2010	413.013.000.000	-	-
2	2011	580.854.000.000	167.841.000.000	40,64
3	2012	620.719.000.000	39.865.000.000	6,86
4	2013	677.221.000.000	56.502.000.000	9,10
5	2014	763.439.149.045	86.218.149.045	12,73
6	2015	900.595.167.183	137.156.018.138	17,97
Jumlah		3.955.841.316.228	487.582.167.183	87,30
Rata-rata		659.306.886.038	97.516.433.437	17,46

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Timur

Tabel 2 di atas menggambarkan bahwa jumlah pengeluaran pemerintah di sector pendidikan yang sudah dialokasikan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 sebesar Rp 3.955.841.316.228. Rata –rata pengeluaran setiap tahun dalam kurun waktu tersebut adalah Rp 659.306.886.038. Pada tahun 2010 pengeluaran pemerintah pada sector pemerintah adalah sebesar Rp 413.013.000.000 sedangkan pada tahun 2015 pengeluarannya sebesar Rp 900.595.167.183. Berarti ada kenaikan pengeluaran sebesar Rp 487.582.167.183 dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 . Rata-rata tambahan pengeluaran pemerintah dalam kurun waktu tersebut adalah Rp 97.516.433.437 atau kenaikannya 17,46 % pertahun.

3.2. Pengeluaran Pemerintah di sector Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam hal ini Pemerintah bertanggung jawab merencanakan.

mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai hal tersebut tentunya dibutuhkan pembiayaan kesehatan yang bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Adapun pengeluaran pemerintah Kabupaten Lombok Timur di sector kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Pengeluaran Pemerintah Di Ssektor Kesehatan Di Kabupaten Lombok Timur (Rp)

No	Tahun	Kesehatan	Perkembangan	Persentase
1	2010	82.994.000.000		
2	2011	98.811.000.000	15.817.000.000	19,1
3	2012	119.354.000.000	20.543.000.000	20,8
4	2013	149.939.000.000	30.585.000.000	25,6
5	2014	161.557.928.863	11.618.928.863	7,7
6	2015	223.565.802.607	62.007.873.744	38,4
Jumlah		836.221.731.470	140.571.802.607	111,6
Rata-rata		139.370.288.578	28.114.360.521	22,32

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Timur

Tabel 3 di atas menggambarkan bahwa jumlah pengeluaran pemerintah di sector kesehatan yang sudah dialokasikan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 sebesar Rp. 836.221.731.470. Rata –rata pengeluaran setiap tahun dalam kurun waktu tersebut adalah Rp. 139.370.288.578. Pada tahun 2010 pengeluaran pemerintah pada sector Kesehatan adalah sebesar Rp 82.994.000.000 sedangkan pada tahun 2015 pengeluarannya sebesar Rp 223.565.802.607. Berarti ada kenaikan pengeluaran sebesar Rp 140.571.802.607 dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 . Rata-rata tambahan pengeluaran pemerintah dalam kurun waktu tersebut adalah Rp 28.114.360.521 atau kenaikannya 22,32 % pertahun

3.3. **Indek Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Pembangunan manusia di Kabupaten Lombok Timur terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Gambaran mengenai Indeks Pembangunan Manusia ditunjukkan oleh table berikut ini :

Tabel 4. Data Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Lombok Timur

No	Tahun	IPM	Persentase (%)
1	2010	58,86	-
2	2011	59,84	1,66
3	2012	60,73	1,49
4	2013	61,43	1,15
5	2014	62,07	1,04
6	2015	62,83	1,22
	RATA-RATA	60,96	1,31

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Timur

Tabel 4 menunjukkan perkembangan IPM selama enam tahun dari tahun 2010 sampai dengan 2015. Pada tahun 2010 dan 2011 IPM Kabupaten Lombok Timur dibawah 60. Ini menunjukkan bahwa capaian pembangun manusia di daerah tersebut tergolong kelompok “rendah”. Sedangkan pada tahun 2012 sampai dengan 2015 capaian pembangunan manusianya tergolong kelompok “sedang” karena capaian IPM nya 60 keatas. Kalau di rata-ratakan Selama enam tahun tersebut IPM di Kabupaten Lombok Timur adalah sebesar 60,96. Jadi dapat dikatakan bahwa capaian pembangunan manusia tergolong sedang dengan rata-rata kenaikan IPM 1,31 % pertahun.

3.4. Hubungan pengeluaran pemerintah di sector pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan IPM.

Salah satu hal yang paling menentukan dalam suksesnya Pembangunan Manusia adalah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. sehingga dua sektor tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah guna mewujudkan Pembangunan Manusia yang pada akhirnya menjadi input dalam proses pembangunan di berbagai sektor.

Untuk melihat bagaimana hubungan pengeluaran pemerintah di sector pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Lombok Timur dapat dijelaskan melalui table berikut.

Tabel 5. Hubungan pengeluaran pemerintah di sector pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Lombok Timur

No	Tahun	Pendidikan (Rp)	Kesehatan (Rp)	Pendidikan dan Kesehatan (Rp)	%	IPM	Peningkatan IPM
1	2010	413.013.000.000	82.994.000.000	496.007.000.000	-	58,86	-
2	2011	580.854.000.000	98.811.000.000	679.665.000.000	37,03	59,84	0,98
3	2012	620.719.000.000	119.354.000.000	740.073.000.000	8,89	60,73	0,89
4	2013	677.221.000.000	149.939.000.000	827.160.000.000	11,77	61,43	0,70
5	2014	763.439.149.045	161.557.928.863	924.997.077.908	11,83	62,07	0,64
6	2015	900.595.167.183	223.565.802.607	1.124.160.969.790	21,53	62,83	0,76
	jumlah	3.955.841.316.228	836.221.731.470	4.792.063.047.698	91,04		3,97
	Rata-rata	659.306.886.038	139.370.288.578	798.677.174.616	18,21	60,96	0,794

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Timur

Dari tabel 5 dapat dijelaskan bagaimana hubungan pengeluaran di sector pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari tahun 2010 sampai dengan 2015 total anggaran yang sudah dikeluarkan di sector pendidikan dan kesehatan adalah sebesar Rp 4.792.063.047.698 (Rp 3.955.841.316.228 untuk sector pendidikan dan Rp 836.221.731.470 untuk sector Kesehatan). Rata-rata pengeluaran pertahun sebesar Rp 798.677.174.616 atau 18,21 % pertahun dengan komposisi 15,11 % untuk sector pendidikan dan 3,10% untuk sector kesehatan. Dalam kurun waktu tersebut terjadi kenaikan IPM dari 58,86 pada tahun 2010 menjadi 62,83 pada tahun 2015 atau terdapat kenaikan sebesar 3,97 poin. Jadi

dengan pengeluaran pemerintah sebesar tersebut ternyata mampu meningkatkan IPM rata-rata setiap tahunnya adalah 0,794 poin. Dari data tersebut dapat pula digambarkan bahwa setiap ada tambahan pengeluaran biaya pendidikan sebesar 15,11% (Rp 659.306.886.038) dan biaya kesehatan sebesar 3,10% (Rp 139.370.288.578) maka dapat menaikkan IPM sebesar 0,794 poin. Pada tahun 2010 dan 2012 pembangunan manusia di Kabupaten Lombok Timur berada pada tingkat kelompok “rendah” karena IPM dibawah “60”. Sedangkan tahun 2012 sampai dengan 2015 sudah mencapai kelompok “sedang” karena IPM sudah diatas “60”. Dengan adanya tambahan pengeluaran baik di sector pendidikan maupun kesehatan dari tahun ketahun ternyata mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Rata-rata pengeluaran pemerintah pertahun pada sector pendidikan dan sector Kesehatan selama enam tahun sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 sebesar RP 798.677.174.616 (Rp 659.306.886.038 pengeluaran pada sector pendidikan dan Rp 139.370.288.578 pengeluaran pada sector kesehatan) atau rata-rata peningkatannya 18,21% pertahun dengan komposisi 15,11 % untuk sector pendidikan dan 3,10% untuk sector kesehatan. Dari pengeluaran tersebut ternyata mampu meningkatkan IPM dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sebesar 3,97 poin atau rata rata peningkatannya sebesar 0,794 poin per tahun. Artinya bahwa setiap ada tambahan pengeluaran biaya pendidikan pertahun sebesar 15,11 % dan pengeluaran biaya kesehatan pertahun sebesar 3,10 % maka dapat menaikkan IPM Kabupaten Lombok Timur sebesar 0.794 poin pertahun. Pada tahun 2010 dan 2011 pembangunan manusia di Kabupaten Lombok Timur berada pada tingkat kelompok “rendah” karena IPM nya dibawah “60“. Pada tahun 2012 sampai dengan 2015 sudah mencapai kelompok “sedang” karena capaian IPM sudah berada pada kisaran: $60 \leq \text{IPM} < 70$. Dengan adanya tambahan pengeluaran baik di sector pendidikan maupun kesehatan dari tahun ketahun ternyata mampu meningkatkan Indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk mempercepat capaian pembangunan manusia dari kelompok “sedang” : $60 \leq \text{IPM} < 70$ ke tingkat kelompok “tinggi” yakni $70 \leq \text{IPM} < 80$ maka dibutuhkan tambahan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan dalam tahun-tahun berikutnya.

Dari kondisi ini disarankan agar pemerintah untuk tahun-tahun yang akan datang secara bertahap dapat meningkatkan pengeluarannya di sector pendidikan dan kesehatan agar IPM di kabupaten Lombok Timur dapat segera mewujudkan IPM ke tingkat kelompok “Tinggi”.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. Mochammad Yuli. 2015. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur*. Skripsi: Universitas Jember.
- Astri. Meylina. dkk. 2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Vol.1 No. 1 Maret 2013*: Universitas Negeri Jakarta.
- Septiana. dkk. 2015. *Pengaruh pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 15 No. 02 - Edisi Juli 2015*: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Nazir. Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro Michael P dan Smith Stephen C (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi ke – 9*. Penerbit Erlangga.
- Usmaliadanti. Christina. 2015. *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sekor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang
- _____ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendidikan.
- _____ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Anggaran Kesehatan.
- _____ Badan pusat statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- _____ BPS Kabupaten Lombok Timur

_____UNDP. 1995 .Human Development Report 1995. New York: Oxford University Press.